

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pandangan kelompok mendukung, menolak dan abstain dari berbagai latar belakang tokoh menandakan pada masing-masing memiliki nilai subjektif yang di dominasi oleh opini yang ditangkap dan berkembang terhadap alasan sebenarnya Daerah Istimewa Minangkabau ini berdiri. Opini yang ditangkap dan berkembang membentuk suatu penilaian individu; mendukung, menolak atau abstain. Kategorisasi ini muncul akibat sudut pandang individu melalui pengolahan data dan informasi yang didapatkan dilapangan.

Pandangan tersebut dimaknai dari pengetahuan, opini, wacana dan pandangan yang didapat dari proses pengamatan, saluran informasi dan isu-isu yang berkembang sehingga memberi ruang dalam mengolah informasi menjadi pendapat melalui perspektif terhadap nilai-nilai yang ditukarkan. Menurut Foucault, wacana tidak dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi wacana merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek).

Pandangan-pandangan tersebut disebut wacana yang akan menjadi parameter dalam bertindak melalui teks, konsep, gagasan dan ide. Wacana belum dikatakan sebagai bentuk realitas namun sebagai bayangan dari sebuah realitas yang akan

dilakukan melalui cara-cara tertentu. Dominasi tokoh-tokoh dari latar belakang bidang akan menentukan bagaimana wacana Daerah Istimewa Minangkabau ini kedepan karena keputusan harus dipilih dan diputuskan secara bersama-sama melalui hasil dari suara terbanyak. Dari berbagai macam suara tersebut terbagi kepada tiga sikap kelompok, yaitu:

1. Mendukung

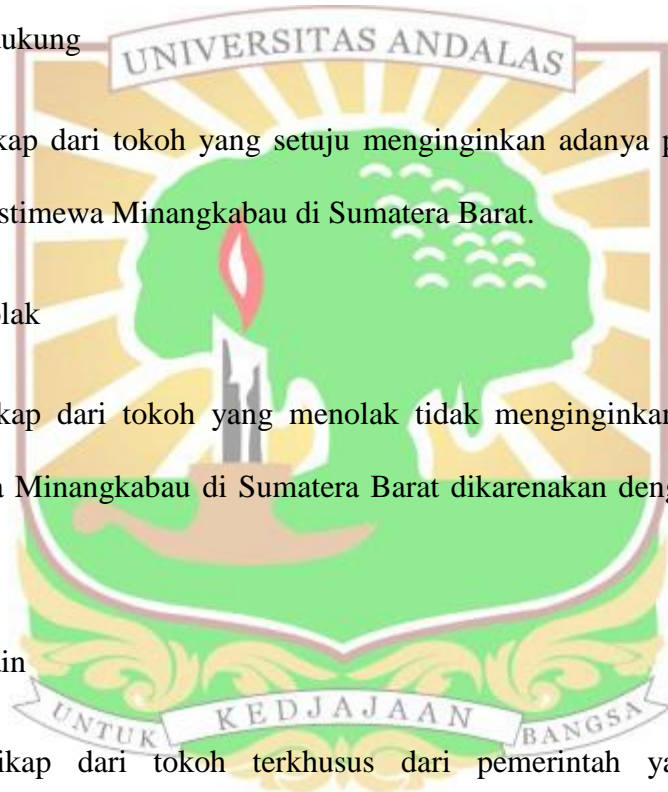
Yaitu sikap dari tokoh yang setuju menginginkan adanya pendirian wacana Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat.

2. Menolak

Yaitu sikap dari tokoh yang menolak tidak menginginkan adanya Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu.

3. Abstain

Yaitu sikap dari tokoh terkhusus dari pemerintah yang belum bisa memberikan pandangan dan komentar terhadap wacana yang pendirian Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat dikarenakan jika salah dalam penyampaian ke publik maka berdampak besar terhadap pembangunan di Sumatera Barat.



4.2 Saran

Pemerintah dan tokoh terkait mesti membentuk suatu badan yang menjelaskan kepada masyarakat bagaimana gambaran dari wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau ini sebenarnya agar tokoh terkait dan masyarakat dapat menilai secara objektif dalam melihat keuntungan dan kerugian dari adanya Daerah Istimewa Minangkabau di Sumatera Barat. Selain itu, hal ini bertujuan jika ada kepentingan dari tokoh terkait maka dapat ketahui secara jelas dan terbuka secara terang tanpa ditutup-tutupi.

Perdebatan yang terjadi antar para tokoh harus mencapai suatu titik yang betul-betul membuka data dan fakta jika benar-benar menginginkan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Dari data dan fakta tersebut masyarakat dapat menilai terhadap keputusan yang akan diambil nantinya.

